

PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU

Riska Kartini¹, Sujianto², Zulkarnaini³

^{1,2,3}Universitas Riau

¹riskakartini1510@gmail.com, ²sujianto@lecturer.unri.ac.id,

³zulkarnainfisip@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of good governance principles in realizing a Child-Friendly City in the City of Pekanbaru. The background of this research is based on the fact that there is still a gap between the achievement of the status of Child-Friendly City and the empirical conditions in the field, especially in the fulfillment of children's rights and protection. Therefore, good governance is needed as a foundation for the formulation and implementation of policies that are in the best interests of children. This research uses the theory of good governance according to Sedarmayanti (2004) which includes nine indicators, namely participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, justice, effectiveness and efficiency, accountability, and strategic vision.

The research method used is a qualitative approach with the type of explanatory descriptive research. Data was collected through observation, interview, and documentation techniques at related agencies that play a role in the implementation of the Child-Friendly City program in Pekanbaru City. The data obtained is then analyzed in depth to describe the conditions for the implementation of the principles of good governance and identify supporting and inhibiting factors in its implementation. The results of the study show that the application of good governance principles in realizing a Child-Friendly City in Pekanbaru City in general has been running, but it is not fully optimal. Several indicators such as participation, justice, and effectiveness have shown good implementation through cross-sector coordination and programs that support the fulfillment of children's rights. However, there are still obstacles in the form of limited resources, suboptimal coordination between agencies, and uneven involvement of the community and children in the policy-making process. Thus, it can be concluded that the application of the principle of good governance in realizing a Child-Friendly City in Pekanbaru City requires strengthening the implementation aspect to be more effective, inclusive, and sustainable. This research is expected to contribute as an evaluation and recommendation material for local governments in improving the quality of governance oriented towards the fulfillment of children's rights and protection.

Keywords: Good Governance, Child-Friendly City, Public Policy, Child Protection, Governance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good governance dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih adanya kesenjangan antara capaian status Kota Layak Anak dengan kondisi empiris di lapangan, khususnya dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan teori good governance menurut Sedarmayanti (2004) yang mencakup sembilan indikator, yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksplanatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi pada instansi terkait yang berperan dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam untuk menggambarkan kondisi penerapan prinsip good governance serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru secara umum telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Beberapa indikator seperti partisipasi, keadilan, dan efektivitas telah menunjukkan implementasi yang cukup baik melalui koordinasi lintas sektor dan program yang mendukung pemenuhan hak anak. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta belum meratanya keterlibatan masyarakat dan anak dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru memerlukan penguatan pada aspek implementasi agar lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kata kunci: good governance, Kota Layak Anak, kebijakan publik, perlindungan anak, tata kelola pemerintahan

A. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan fondasi utama dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, termasuk dalam upaya pemenuhan hak-hak anak. Dalam kerangka kebijakan publik, konsep Kota Layak

Anak (KLA) menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak anak secara menyeluruh dan terpadu. KLA tidak hanya menekankan pada penyediaan fasilitas ramah anak, tetapi juga menuntut adanya sistem tata kelola pemerintahan yang mampu mengintegrasikan kepentingan terbaik

bagi anak dalam setiap proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi KLA sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Kota Pekanbaru sebagai salah satu daerah yang telah memperoleh predikat Kota Layak Anak masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam implementasinya. Secara empiris, masih ditemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak anak, ketimpangan akses terhadap layanan publik, serta belum optimalnya keterlibatan anak dan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian normatif yang telah diraih dengan realitas di lapangan. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek program, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung kebijakan yang berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, penerapan prinsip good governance menjadi aspek yang krusial dalam

mendukung terwujudnya Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, keadilan, serta efektivitas dan efisiensi perlu diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good governance dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksplanatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penerapan prinsip good governance dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi empiris di lapangan,

serta mengungkap makna, proses, dan dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian dilaksanakan pada instansi-instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan langsung dengan program Kota Layak Anak, meliputi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, PPA Polresta Kota Pekanbaru, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kota Pekanbaru, serta Unit Pelaksana Teknis PPA Kota Pekanbaru. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung berinteraksi dengan subjek penelitian guna memperoleh data yang mendalam dan kontekstual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik penerapan prinsip good governance, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi dari informan yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program. Dokumentasi digunakan

sebagai data pendukung yang meliputi dokumen kebijakan, laporan kegiatan, dan arsip terkait. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan prinsip good governance berdasarkan indikator yang digunakan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru telah diupayakan melalui berbagai kebijakan dan program lintas sektor. Pemerintah daerah melibatkan sejumlah instansi terkait yang memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, sehingga tercipta koordinasi yang cukup baik dalam pelaksanaan program. Namun demikian, tingkat implementasi setiap indikator good governance masih menunjukkan variasi, baik dari segi capaian maupun efektivitas pelaksanaannya.

Pada indikator partisipasi, ditemukan bahwa pemerintah telah menyediakan ruang bagi masyarakat dan anak untuk terlibat dalam proses kebijakan, salah satunya melalui forum anak. Keberadaan forum ini menjadi wadah dalam menyalurkan aspirasi anak, meskipun dalam praktiknya keterlibatan tersebut masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategis. Partisipasi yang terjadi cenderung bersifat konsultatif, sehingga belum mencerminkan keterlibatan yang substantif dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan.

Indikator aturan hukum menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki landasan regulasi yang cukup jelas dalam mendukung pelaksanaan program Kota Layak Anak. Berbagai kebijakan dan peraturan telah disusun sebagai dasar hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kendala terkait konsistensi penegakan aturan serta keterbatasan pemahaman aparat pelaksana terhadap substansi kebijakan yang ada.

Dalam aspek transparansi, pemerintah telah melakukan upaya penyampaian informasi kepada publik melalui berbagai media, termasuk kerja sama dengan forum komunikasi dan media massa. Informasi terkait program Kota Layak Anak telah disosialisasikan kepada masyarakat, namun akses terhadap informasi tersebut belum sepenuhnya merata. Hal ini menyebabkan masih adanya kelompok masyarakat yang belum memperoleh informasi secara optimal mengenai kebijakan dan program yang dijalankan.

Selanjutnya, pada indikator responsivitas, pemerintah menunjukkan adanya mekanisme pelayanan bagi anak, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan melalui unit layanan khusus. Keberadaan unit tersebut mencerminkan adanya komitmen dalam memberikan respons yang cepat terhadap permasalahan anak. Akan tetapi, keterbatasan sumber daya dan kapasitas layanan masih menjadi kendala dalam menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat secara merata.

Indikator orientasi konsensus terlihat melalui adanya forum koordinasi lintas sektor yang

dilakukan secara berkala. Forum ini menjadi sarana bagi berbagai pihak untuk menyelaraskan program dan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Meskipun demikian, tingkat sinergi antarinstansi belum sepenuhnya optimal, sehingga masih ditemukan tumpang tindih program dan kurangnya integrasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Pada Indikator keadilan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh anak tanpa diskriminasi. Program-program yang dijalankan telah mengakomodasi kebutuhan anak dari berbagai latar belakang, termasuk anak berkebutuhan khusus. Namun demikian, pemerataan kualitas layanan masih menjadi tantangan, sehingga belum semua anak merasakan manfaat yang sama secara optimal.

Dalam aspek efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan program Kota Layak Anak telah menunjukkan adanya upaya pemanfaatan sumber daya secara optimal melalui mekanisme evaluasi dan pendampingan. Beberapa program telah berjalan sesuai dengan tujuan

yang ditetapkan, meskipun hasil yang dicapai belum sepenuhnya maksimal. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana menjadi faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas program.

Indikator akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki mekanisme pertanggungjawaban melalui sistem evaluasi dan pelaporan kinerja. Program Kota Layak Anak secara rutin dievaluasi untuk menilai capaian yang telah diperoleh. Namun demikian, transparansi dalam pelaporan kepada publik masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas perkembangan dan hasil pelaksanaan program.

Pada indikator visi strategis, pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen dalam merumuskan arah kebijakan jangka panjang untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Visi tersebut tercermin dalam berbagai rencana dan program yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup anak. Meskipun demikian, implementasi visi tersebut masih memerlukan penguatan dalam hal konsistensi kebijakan dan kesinambungan program agar dapat

berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru secara umum telah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan dan program lintas sektor. Pemerintah daerah telah berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pelaksanaan program yang berorientasi pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. Keberadaan regulasi, forum koordinasi, serta unit layanan khusus menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam mendukung terwujudnya Kota Layak Anak.

Namun demikian, implementasi prinsip good governance tersebut belum sepenuhnya optimal. Beberapa indikator masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan partisipasi masyarakat dan anak yang belum bersifat substantif, belum meratanya akses informasi, serta koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara maksimal. Selain itu,

keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana turut memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, sehingga belum seluruh anak dapat merasakan manfaat kebijakan secara merata.

Dengan demikian, diperlukan upaya penguatan dalam penerapan prinsip good governance agar pelaksanaan program Kota Layak Anak dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta perluasan partisipasi masyarakat dan anak dalam proses kebijakan. Hal ini penting agar tujuan mewujudkan Kota Layak Anak yang benar-benar menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Aji, Guntur Jatmiko, Yaqub Cikusin, and Hirshi Anadza. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak." *Respon Publik* 15.1 (2021): 14-21.
- Delaseh, G. K. (2023). implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2020 tentang kabupaten layak

- anak melalui pendekatan pendidikan di kabupaten landak provinsi kalimantan barat (doctoral dissertation, ipdn)
- Dwiyanto, a. (2011). mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. yogyakarta: gadjah mada university press.
- Fahmi, Much Sari'ul, Anggraeny Puspaningtyas, and M. Kendry Widiyanto. "Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mewujudkan Good Governance pada Perspektif New Public Leadership di Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2.3 (2024): 229-245
- Farhaini, Y. (2021). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Fithriyyah, Mustiqowati Ummul. "Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 9.2 (2017): 154-171.
- Irwan, I., Damanik, E., Melia, Y., Elvawati, E., Jannah, L. I., & Lubis, G. C. (2022). Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Pasaman Barat. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(2), 398-403.
- Jannah, M., Amaliatulwalidain, A., & Kariem, M. Q. (2022). Optimalisasi Peran Forum Anak Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Palembang. *Governance*, 10(2), 65-67.
- Lutfianti, E. N., Wilujeng, S., & Hentika, N. P. (2023). Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Wringinrejo Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 281-289.
- Mahmud, & suandi (2020). implementasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak (kla) di kota palembang. *jurnal ilmu administrasi dan studi kebijakan*
- Mahmud, A., & Suandi, S. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 2(2), 36-52
- Mandasari, N. (2023). Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, dan Open Government. *Economics, Business, Management, & Accounting Journal (Ebisma)*, 3(1), 46-42.
- Natalia, a. (2025). paradigma good governance dalam administrasi publik memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (tbp). *jurnal tapis: jurnal teropong aspirasi politik islam*
- Pandiangan, n. i. (2023). implementasi kebijakan program kota layak anak di kota medan dalam upaya pemenuhan hak bermain anak.
- Prayana, I. Kadek Rian. "Optimalisasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Denpasar: Pendekatan Administrasi Publik Untuk Mewujudkan Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan*

- Pembangunan 11.2 (2024):247-257.
- Ramadhan, M. A. (2023). Peran Forum Anak Dalam Upaya Membantu Pemerintah Mewujudkan Kota Layak Anak (Kla) Di Kota Pekanbaru (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Rangkuti, Safitri Ridwan, and Irfan Ridwan Maksum. "Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok." *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 8.1 (2019): 38.
- Riggio, E. (2002). Child friendly cities: good governance in the best interests of the child. *Environment and Urbanization*, 14(2), 45-58.
- Rumtaning, I. (2014). Kota layak anak dalam perspektif perlindungan anak. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27(1).
- Samodra, Wibawa., Yuyun . P dan Agus P. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*.
- Sari, A. I., & Rusli, Z. (2023). Tata kelola pemerintahan dinamis (dynamic governance) dalam penyelenggaraan kota layak anak di Kota Pekanbaru. *J. Adm. Publik*, 5(1).
- Sihotang, J. S. (2023). Good Governance dalam Pelayanan Publik. *Jurnal manajemen dan ekonomi*, 1(2), 188-201.
- Taufiqurokhman, & almuqsith. (2025). comparative perspectives on good governance: global principles and local realities. *politeia: journal of public administration and political science and international relations*, United nations development programme (undp). (1997). *governance for sustainable human development*. new york: undp.
- Buku :**
- Anggraini, D. (2019). *Pengembangan Kapasitas Pegawai Dalam Mewujudkan Good Governance*.
- Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, W William. 2000. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Pasolong, Harbani.2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta, W.J.S. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju
- Sedarmayanti. 2004. *Good Government (Pemerintahan yang baik)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sinambela, P, dkk, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik : teor, Kebijakan dan implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, R. B. (2024). Pengaruh good governance dan kompetensi sumber daya manusia serta motivasi terhadap komitmen kerja dan kinerja pegawai.

Undang – Undang :

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kota Layak Anak

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak

Website :

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-pekanbaru-targetkan-predikat-utama-sebagai-kota-layak-anak> (Diakses pada tanggal 28 Juni 2025)

<https://riau.antaranews.com/berita/123660/pekanbaru-sabet-tiga-penghargaan-sebagai-kota-layak-anak> (Diakses pada tanggal 28 Juni 2025)

<https://data.unicef.org/resources/the-state-of-the-worlds-children-2011-adolescents-an-age-of-opportunity/> (Diakses pada tanggal 29 Juni 2025)

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/247972/perda-prov-riau-no-7-tahun-2019> (Diakses pada tanggal 07 Juli 2025)

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/199082/perwali-kota-pekanbaru-no-111-tahun-2021> (Diakses pada tanggal 07 Juli 2025)

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/127719/2025/09/17/222-anak-terlantar-dan-gepeng-di-pekanbaru-sepanjang-tahun-2025-ditangani-banyak-dari-luar-daerah#sthash.uZIIICQP.dpbs>

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/kementerian-pppa-anugerahi-177-daerah-sebagai-kota-layak-anak> (Diakses pada tanggal 07 Juli 2025)

<https://kiblatriau.com/news/detail/27469/apsai-siap-dukung-kota-pekanbaru-jadi-kota-layak-anak-peringkat-utama> (Diakses pada tanggal 08 Juli 2025)

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru> (Diakses 20 Oktober 2025)

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/127719/2025/09/17/222-anak-terlantar-dan-gepeng-di-pekanbaru-sepanjang-tahun-2025> (Diakses 06 Januari 2026)

<https://www.polri.go.id/profil-dan-tugas-pokok-polri> wilayah-riau (Diakses 10 Januari 2026)